

**PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, MANAJEMEN LABA DAN
SOLVABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2009-2011)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

REZI FAJRINA

NIM : 2009 / 13076

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, MANAJEMEN LABA DAN
SOLVABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

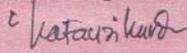
(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2009-2011)

Nama : Rezi Fajrina
NIM/BP : 13076/2009
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Manajemen
Fakultas : Ekonomi

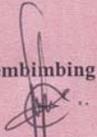
Padang, Februari 2014

Disetujui Oleh :

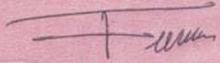
Pembimbing I


Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP.197105222000032 001

Pembimbing II


Charoline Cheisvivanny, SE, M. Ak
NIP. 19730723 200604 2 001

Ketua Prodi Akuntansi


Fefri Indra Arza, SE., M.Sc., Ak
NIP. 19730213 1999031 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

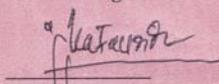
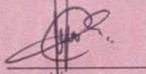
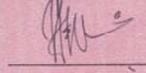
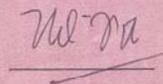
PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, MANAJEMEN LABA DAN
SOLVABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun
2009-2011)

Nama : Rezi Fajrina
NIM/BP : 13076/2009
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2014

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	
2. Sekretaris	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
3. Anggota	: Herlina Helmy, SE, M.S.Ak	
4. Anggota	: Nelvirita, SE, M.Si., Ak	

ABSTRAK

Rezi Fajrina. 13076. Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba dan Solvabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pembimbing 1 : Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

Pembimbing 2 : Charoline Cheisvivanny, SE, M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris sejauh mana : 1) Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, 2) Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, 3) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 4) Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, 5) Pengaruh Solvabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Pemilihan sampel dengan menetapkan kriteria tertentu dan sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 21 perusahaan. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji t .

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial $0,229 > \alpha 0,05$ $t_{hitung} 1,216 < t_{tabel} 1,671$, koefisien β dari variabel kinerja lingkungan bernilai positif yaitu 0,161 (H_1 ditolak). 2) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial $0,921 > \alpha 0,05$ dan $t_{hitung} -0,100 < t_{tabel} 1,671$, nilai β sebesar 0,293 menunjukkan arah negatif. (H_2 ditolak). 3) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan $0,728 > \alpha 0,05$ dan $t_{hitung} -0,349 < t_{tabel} 1,671$. koefisien β dari variabel kepemilikan institusional bernilai negatif yaitu 0,181 (H_3 ditolak). 4) manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial $0,558 > \alpha 0,05$ dan $t_{hitung} -0,590 < t_{tabel} 1,671$. Nilai koefisien β dari variabel manajemen laba bernilai negatif yaitu -0,254 (H_4 ditolak). 5) solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan $0,001 < \alpha 0,05$ dan $t_{hitung} 3,460 > t_{tabel} 1,671$. Nilai koefisien β dari variabel solvabilitas bernilai positif yaitu 0,219. (H_5 diterima).

Dalam penelitian ini disarankan pemerintah hendaknya menetapkan regulasi yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai praktik dan pengungkapan, serta pengawasan CSR pada perusahaan di Indonesia sehingga praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia semakin meningkat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba dan Solvabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE,M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
5. Kepada seluruh keluarga, adik-kakak yang telah memberikan semangat dan dukungan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan ini.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN	
A. Kajian Teori	
1. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	15
2. Kinerja Lingkungan	31
3. Kepemilikan Manajerial	35
4. Kepemilikan Institusional.....	38
5. Manajemen Laba.....	41
6. Solvabilitas.....	45
B. Penelitian Terdahulu.....	50
C. Pengembangan Hipotesis.....	51
D. Kerangka Konseptual.....	55
E. Hipotesis.....	58
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	59

B. Populasi dan Sampel	59
C. Jenis dan Sumber Data.....	62
Teknik dan Pengumpulan Data	62
E. Variabel Penelitian	63
F. Pengukuran Variabel.....	63
G. Model dan Tekni Analisis Data.....	67
H. Definisi Operasional	71

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	74
B. Deskriptif Variabel Penelitian	
1. Analisis Deskriptif.....	77
2. Statistik Deskriptif.....	87
3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	89
4. Uji Model.....	93
5. Pengujian Hipotesis.....	97
C. Pembahasan.....	99

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Keterbatasan Penelitian.....	107
C. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Item Pengungkapan.....	24
Tabel 2	Penelitian Terdahulu.....	50
Tabel 3	Tahapan Pengambilan Sampel.....	61
Tabel 4	Sampel Perusahaan.....	61
Tabel 5	Indeks Pengungkapan CSR Tahun 2009-2011.....	78
Tabel 6	Peringkat PROPER Tahun 2009-2011.....	79
Tabel 7	Tingkat Kepemilikan Manajerial Tahun 2009-2011.....	81
Tabel 8	Tingkat Kepemilikan Institusional Tahun 2009-2011.....	82
Tabel 9	Data <i>Discretionary Accrual</i>	84
Tabel 10	Tingkat Solvabilitas.....	86
Tabel 11	Hasil data <i>descriptive statistics</i>	87
Tabel 12	Uji normalitas residual.....	90
Tabel 13	Uji multikolinearitas.....	91
Tabel 14	Uji heterokedastisitas.....	92
Tabel 15	Uji autokorelasi.....	93
Tabel 16	Hasil uji F statistik.....	93
Tabel 17	Koefisien determinasi.....	94
Tabel 18	Regresi Berganda.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
1. Kerangka Konseptual.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan tidak hanya memenuhi kepentingan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada investor dan kreditor tetapi juga kepada *stakeholder* lainnya yaitu pelanggan, karyawan, pemasok dan komunitas lokal. Perusahaan adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba (Griffin, 2006:4). Dampak dari kegiatan yang dilakukan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan sendiri. Aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan yang bertentangan dengan masyarakat akan mempengaruhi eksistensi perusahaan. Perusahaan berdiri secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampaknya membuat masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi atas lingkungan, sehingga masyarakat menuntut perusahaan tidak lagi hanya memperhatikan aspek keuangan, melainkan harus meliputi aspek lingkungan dan aspek sosial.

Kegiatan tanggung jawab sosial awalnya merupakan kegiatan yang bersifat sukarela. Sejak tanggal 23 September 2007, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR *disclosure*) mulai diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007, dinyatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada pasal 66 ayat 2c UU No. 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan

dalam laporan tahunan. Pengungkapan informasi pelaksanaan kegiatan CSR telah dianjurkan dalam PSAK No. 1 tahun 2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian tanggung jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09. Apabila dibandingkan dengan perkembangan CSR di Indonesia dengan CSR diluar negeri, perkembangan CSR diluar negeri sudah sangat populer. Pada beberapa negara, CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilai kinerja sebuah perusahaan dengan dicantulkannya informasi CSR di dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Indah dan Rahmawati, 2010).

Tuntutan masyarakat memaksa perusahaan untuk memperhatikan dampak lingkungan yang lazim disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut *World Business Council on Sustainable Development* (WBCSD) dalam Arief (2008: 107), tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika berperilaku dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen lainnya adalah kualitas hidup karyawan, keluarga, komunitas lokal serta masyarakat luas. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan memberi harapan kelangsungan hidup perusahaan terjamin.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan pengkomunikasian atas kegiatan organisasi terhadap lingkungan fisik dan sosialnya kepada *stakeholder* yang dibuat dalam laporan tahunan atau laporan sosial terpisah. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai seluruh aktifitas yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya dan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari segi ekonomi dan politis. Pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan juga dapat

memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial telah dilakukan di Indonesia. Laporan tahunan merupakan media yang biasa digunakan perusahaan di Indonesia untuk mengungkapkan aktifitas sosial tersebut. Pengungkapan aktifitas sosial juga dilakukan oleh sebagian kecil perusahaan melalui laporan berkelanjutan. Perusahaan memilih bentuk pengungkapan yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas organisasinya. Bila perusahaan tidak mengungkapkan aktifitas tanggung jawab sosial, *stakeholder* akan beranggapan perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan meragukan *going concern* perusahaan tersebut.

Di Indonesia permasalahan mengenai pengungkapan akuntansi sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan telah dibahas dan dianalisis oleh beberapa peneliti yaitu Indah dan Rahmawati (2010), Novita (2009), Titan (2012), Ahmad dan Antonius (2012). Beberapa penelitian diketahui bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Faktor- faktor tersebut antara lain : ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, umur perusahaan, *Enviromental performance*, *polical visibility*, *Earning management*, mekanisme GCG, profitabilitas, likuidasi, solvabilitas dan *size*.

Fakta yang terjadi di Indonesia, belum ada kesepakatan standar pelaporan CSR yang dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR. Pembaca laporan tahunan mengalami kesulitan dalam membaca laporan CSR karena informasi yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam. Laporan berkelanjutan yang menggunakan standar GRI G3 hanya beberapa perusahaan yang telah menerbitkan. Standar yang

mengatur pelaporan CSR dalam laporan tahunan belum ada, menyebabkan perbedaan luas pengungkapan CSR. Peneliti tertarik untuk meneliti beberapa faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Faktor yang akan diteliti oleh peneliti adalah kinerja lingkungan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, manajemen laba dan solvabilitas.

Kinerja lingkungan adalah bagaimana kinerja perusahaan untuk ikut andil dalam melestarikan lingkungan (Riantono, 2010). Menurut Suratno dkk (2007), mengemukakan bahwa kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan yang diperhatikan perusahaan meliputi pengawasan polusi, dampak lingkungan terkait dengan siklus hidup suatu produk dan memikirkan rencana investasi dibidang teknologi yang rentan pengaruhnya terhadap lingkungan. Kelestarian lingkungan sudah menjadi kebijakan pemerintah Indonesia setiap periode. Kebijakan ekonomi makro yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi alam mulai dipikirkan oleh pemerintah. Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta penerapannya di dalam industri dengan Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun menjadi bukti bahwa pemerintah peduli terhadap pengelolaan lingkungan. Evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan dilakukan agar tidak hanya menjadi regulasi saja.

Kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). PROPER merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan disinsentif kepada penanggung jawab usaha. Pemberian insentif berupa penghargaan PROPER. Pemberian penghargaan

PROPER berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dalam pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran lingkungan hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi lima warna yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam.

Kesadaran perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan membuat para investor ikut menaruh perhatian terhadap isu lingkungan terutama kaitannya dengan pemilihan investasi. Investor akan memilih investasi yang tidak banyak mengandung resiko, yang disebabkan oleh kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Pengungkapan kinerja lingkungan digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengembangkan usaha agar punya hubungan baik dengan lingkungannya. Menurut Novita (2009), kinerja lingkungan yang baik bagi perusahaan dapat mengurangi pengungkapan biaya- biaya lingkungan masa depan perusahaan. Pengungkapan informasi biaya lingkungan ini harus disampaikan sebagai berita gembira bagi investor. Perusahaan yang memiliki *good news* akan lebih cenderung meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya (Novita, 2009). Jadi, semakin banyak perusahaan berperan didalam kegiatan lingkungan, akan semakin banyak pula yang akan diungkapkan oleh perusahaan mengenai kinerja lingkungan yang dilakukannya dalam laporan tahunan.

Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan- kepentingan tersebut sehingga timbul biaya keagenan. Beberapa alternatif untuk mengurangi *agency cost*, diantaranya dengan kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional (Tendi, 2008).

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari jumlah saham yang dikelola oleh perusahaan (Gideon, 2005). Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan membuat manajer ikut merasakan manfaat dan kerugian dari pengambilan keputusan yang salah.

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Manajer berusaha memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan biaya pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktifitas tersebut. Teori keagenan mengatakan bahwa semakin banyak kepemilikan manajemen didalam perusahaan, manajemen akan semakin banyak melakukan kegiatan produktif yang dapat meningkatkan *image* perusahaan.

Menurut Reni (2006), perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam industri yang memiliki risiko politis yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain. Undang- undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa perusahaan yang diwajibkan pemerintah merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan, tentunya memiliki lebih banyak pemegang saham yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin

produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan sehingga biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer akan mengungkapkan informasi sosial untuk meningkatkan *image* perusahaan.

Menurut Kamaliah, dkk (2010), struktur kepemilikan lain adalah kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

Menurut Arif dalam Indah (2010), semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen sehingga, kepemilikan institusi dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Jadi, investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan.

Menurut Belkaoui (2007:201), manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Kegiatan CSR yang

biasa dilakukan untuk menarik dukungan dari kelompok tersebut adalah : memasukkan aspek sosial ke dalam proses produksi, mengadopsi praktek pengembangan sumber daya manusia secara progresif, meningkatkan kegiatan yang ramah lingkungan melalui kegiatan daur ulang dan pengurangan polusi dan limbah atau dengan mempercepat tujuan dari organisasi masyarakat.

Menurut Mc Williams et al (2006) dalam Danang (2011:29), usaha yang memungkinkan dilakukan oleh manajer untuk mengamankan posisi mereka adalah dengan membuat dan melibatkan diri dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* dan lingkungan sosial masyarakat, dalam hal ini *corporate social responsibility* (CSR). Jadi, semakin tinggi manajemen laba maka semakin luas pengungkapan CSR karena manajer ingin mengamankan posisi mereka dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan.

Solvabilitas adalah aset dan kekayaan yang cukup untuk menutupi liabilitasnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (Ahmad Kamil, 2009). Implementasi tanggung jawab sosial membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perusahaan menyediakan biaya khusus untuk melaksanakannya. Perusahaan sebagai organisasi yang selalu butuh dana untuk pengembangan usahanya maupun untuk kelancaran jalannya kegiatan operasi, tidak luput dari kewajibannya kepada investor. Manajemen bertanggung jawab kepada *investor* dan *kreditor* atas pengelolaan dana tersebut, baik mengenai keselamatan maupun tingkat pengembalian (biasanya diukur dengan laba).

Investor sebelum mengambil keputusan investasi perlu menimbang mengenai informasi profitabilitas dan solvabilitas perusahaan. Informasi profitabilitas dan solvabilitas diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian prospek perusahaan dimasa datang yang berhubungan dengan tingkat resiko investasi. Menurut Lekok dan Johan (2006) dalam Ahmad (2012), entitas dikatakan *solvabel* apabila memiliki aset dan kekayaan yang cukup untuk menutup liabilitasnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Dengan demikian tingkat solvabilitas entitas dapat dijadikan indikator untuk mengukur kemampuan entitas dalam memenuhi liabilitas jangka pendek. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang, dengan cara menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah informasi yang meyakinkan kreditur bahwa perusahaan mampu untuk memenuhi hak kreditur.

Fenomena yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu pada PT Jaya Pari steel, Tbk yang merupakan industri peleburan logam. PT Jaya Pari steel, Tbk beroperasi di desa Margomulyo, Tandes- Surabaya. Pada tahun 2009- 2010 PT Jaya Pari steel, Tbk mendapat peringkat hitam atas penilaian PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup (www.menlh.go.id). Peringkat hitam menginterpretasikan bahwa perusahaan tidak mengetahui dan tidak peduli sama sekali terhadap aspek- aspek pengelolaan lingkungan yang seharusnya diterapkan di dalam sistem industri. Aspek aspek pengelolaan lingkungan yang terdiri atas aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B-3 serta berbagai kewajiban lainnya yang terkait dengan AMDAL. Perseroan berusaha untuk memperhatikan aspek

lingkungannya. Upaya yang dilakukan PT Jaya Pari steel, Tbk untuk mendapatkan sertifikat biru antara lain : (1) Membuat TPS B-3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah kota Surabaya (2) Menata Lingkungan Sekitar (3) Pelaporan – pelaporan tentang limbah B-3 disyaratkan secara rutin. Pada tahun 2011 PT Jaya Pari steel, Tbk mendapat sertifikat penghargaan dalam rangka PROPER dengan kategori biru dari Kementerian Lingkungan Hidup RI sebagai bentuk kepedulian kepatuhan perusahaan pada peraturan dan perundang- undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang ada. (www.mnlh.go.id)

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan keragaman hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Novita (2008), hasil penelitiannya menyatakan bahwa *enviromental performance* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sudaryanto (2011), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap *coorporate social responsibility disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Maria (2012), menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah dan Rahmawati (2010), Waryanto (2010), Yulia dan Melvia (2011), menunjukkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar kepemilikan instiusional maka semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian Titan (2008), penelitian tersebut tidak berhasil membuktikan pengaruh signifikan positif.

Hubungan antara manajemen laba dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga memberikan hasil yang beragam. Penelitian oleh Marditiana (2012) dan Ishlahul Amal (2011) menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara manajemen laba dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena manajemen laba yang dilakukan manajer perusahaan ditutupi dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian Danang (2011), Arum (2012), penelitian tersebut tidak berhasil membuktikan pengaruh signifikan positif.

Hubungan antara solvabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan hal yang sulit untuk dipahami. Penelitian yang dilakukan oleh Khoyum (2012) menunjukkan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan secara simultan. Sedangkan penelitian oleh Ahmad (2009), tidak berhasil membuktikan adanya hubungan yang signifikan.

Dari beberapa penelitian tersebut, banyak keragaman hasil yang ditemukan dalam setiap penelitian. Keragaman hasil terjadi karena perbedaan tahun penelitian dan sampel yang digunakan oleh masing-masing peneliti, dan tidak terdapat variabel pemoderasi. Variabel pemoderasi terdapat pada hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan yang dikaitkan dengan nilai perusahaan. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, tidak menggunakan variabel nilai perusahaan.

Beda penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam hal variabel, pengukuran variabel dan waktu penelitian dan sampel. Pengukuran variabel berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah variabel kinerja lingkungan. Penelitian

yang akan dilakukan ini menggunakan hasil PROPER. Lindrianasari (2006), menggunakan ISO 14001. ISO 14001 diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Sistem Manajemen Lingkungan yang memenuhi standar internasional dan dikeluarkan oleh pihak yang kompeten. Untuk satu perusahaan berbeda-beda di setiap provinsi sedangkan jika menggunakan ISO 14001, perusahaan belum banyak yang melakukan sertifikasi ISO 14001 walaupun banyak organisasi usaha yang tertarik untuk mengembangkan sistem manajemen lingkungan. Salah satu kendala yang dikemukakan oleh dunia usaha adalah biaya sertifikasi. Sampel perusahaan peneliti menggunakan perusahaan yang memiliki Laporan Keuangan dan Tahunan tahun 2009-2011. Perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan manufaktur, perusahaan pertambangan dan perusahaan sektor pertanian yang memiliki informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Pemilihan ketiga sektor perusahaan ini karena berdasarkan UU PT Pasal 74 (1), menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, serta hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba dan Solvabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauhmana kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ?
2. Sejauhmana kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ?
3. Sejauhmana kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ?
4. Sejauhmana manajemen laba berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ?
5. Sejauhmana solvabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
4. Pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
5. Pengaruh solvabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai kalangan yaitu :

1. Bagi Penulis, memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Bagi Praktisi, Khususnya manajemen dalam menentukan informasi apa yang akan diungkapkan berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap *stakeholder* secara keseluruhan.
3. Bagi Akademisi, dapat memberi literatur yang dapat membantu dalam pengembangan ilmu akademik.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, menambah pengetahuan serta dapat menjadi referensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

a. Pengertian Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pratiwi dan djamhuri (2004) dalam Andini (2011), mengartikan pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada *stakeholder* mengenai segala aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Menurut Guthrie dan Mathew (1995) dalam Naila (2009:6), pengungkapan *corporate social responsibility* dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah. Menurut Hackston dan Milne (1996) dalam Alifa (2011:6), pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *corporate social responsibility* atau *social disclosure*, *corporate social reporting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan pengkomunikasian atas kegiatan organisasi terhadap lingkungan fisik dan sosialnya kepada *stakeholder* yang dibuat dalam laporan

tahunan atau laporan sosial terpisah. Pengungkapan tanggung jawab sosial memperluas tanggung jawab organisasi khususnya perusahaan, diluar peran tradisionalnya untuk mencari dan menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya, baik lingkungan *internal* maupun lingkungan eksternal. Lingkungan *internal* yang terdiri dari karyawan dan investor. Lingkungan *eksternal* yang terdiri atas pemasok, pelanggan dan komunitas lokal.

Menurut Soewardjono (2005:580), tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Pengungkapan juga dapat diwajibkan untuk :

1. Tujuan melindungi

Tujuan ini dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya karena perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka.

2. Tujuan informatif

Tujuan ini dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membentuk keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

3. Tujuan kebutuhan khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju.

Kesadaran perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial membuat para investor ikut menaruh perhatian terhadap isu lingkungan terutama kaitannya dengan pemilihan investasi. Para investor tidak akan memilih investasi yang banyak mengandung resiko, yang disebabkan oleh kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Menurut Imas (2008), pengungkapan kinerja lingkungan digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengembangkan usaha perusahaan. Perusahaan yang memiliki *goodnews* akan lebih cenderung meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan.

Teori *stakeholder* berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun memberikan manfaat bagi *stakeholders*. Tujuan utama dari manajer perusahaan adalah untuk menyeimbangkan konflik dengan *stakeholders*. CSR merupakan perangkat canggih yang dapat digunakan untuk menggali dukungan dari pemangku kepentingan. Menurut Prior et al (2007) dalam Ihlashul (2011), mengatakan bahwa manajer yang memanipulasi pendapatan (*earning management*) menggunakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan *stakeholder*.

Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul biaya

keagenan. Beberapa alternatif untuk mengurangi *agency cost*, diantaranya dengan kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional (Tendi, 2008). Menurut Anna (2010), manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah.

Kepemilikan saham oleh institusi dianggap sebagai *sophisticated investor* karena mereka merupakan investor yang tidak mudah dibohongi manajer. Jumlah kepemilikan yang signifikan dapat memonitor manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktifa perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan salah satunya kreditur. Perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Menurut Rahajeng (2010), untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak- hak mereka sebagai kreditur, maka diperlukan tambahan informasi termasuk pengungkapan CSR yang menunjukkan bahwa entitas memiliki peluang untuk tetap bertahan atau *going concern*.

b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Brown dalam Ismail Solihin (2008), tanggung jawab sosial perusahaan adalah “*it refers to the obligations of businessman to persue those policies, to make that decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*”. Definisi tanggung jawab sosial yang diberikan oleh Brown telah memberi landasan awal bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai- nilai masyarakat.

Menurut Wibisono (2007) dalam Andini (2011), CSR merupakan konsep ketika perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan lebih baik dan lingkungan lebih lestari. Menurut Griffin (2006:67), tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang berhubungan, namun merujuk pada seluruh cara bisnis berupaya menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan pribadi dalam lingkungan sosialnya. Kelompok dan individu seringkali disebut sebagai pihak yang berkepentingan dalam organisasi.

Lembaga lain adalah WBCSD yang kini dinamakan *Business Action for Sustainable Development*. CSR adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika berperilaku (*behavioural ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas.

Perkembangan CSR

Menurut Ismail (2008:20), tiga periode penting dalam perkembangan konsep CSR

1. Perkembangan Awal Konsep CSR di era tahun 1950-1960

Konsep awal dikemukakan oleh Howard R. Brown. Selain itu Davis dan Carroll 1999 dalam Ismail (2008:15) Davis memperkuat argumennya dengan menegaskan adanya *iron law of responsibility*. Davis menyatakan” tanggung jawab sosial para pelaku bisnis akan sejalan dengan kekuasaan sosial yang mereka miliki oleh karenanya bila pelaku usaha mengabaikan tanggung jawab sosialnya maka hal ini bisa mengakibatkan merosotnya kekuatan sosial perusahaan”.

2. Perkembangan konsep CSR periode tahun 1970- 1980-an

Committee for Economic Development (CED) membagi CSR kedalam tiga lingkaran tanggung jawab, yakni 1) lingkaran tanggung jawab terdalam mencakup tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan fungsi ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang dan pelaksanaan pekerjaan secara efisien serta pertumbuhan ekonomi. 2) lingkaran tanggung jawab pertengahan, menunjukkan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi dan meningkatkan perhatian terhadap konservasi lingkungan hidup, hubungan dengan karyawan, meningkatnya ekspektasi konsumen untuk memperoleh informasi produk yang jelas, serta perlakuan yang adil terhadap karyawan di tempat kerja. 3) Lingkaran tanggung jawab luar mencakup kewajiban perusahaan untuk lebih aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan sosial.

3. Perkembangan konsep CSR di era tahun 1990-an sampai saat ini

Pada tahun 1987 *The World Commission On Environment and Development* yang lebih dikenal dengan nama *The Brundtland Commission* mengeluarkan

laporan yang dipublikasikan oleh *Oxford University Press* berjudul *our common future*. Salah satu poin penting yang diperkenalkan adalah konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) yang di definisikan oleh *The Brundtland Commission* sebagai berikut:

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Saat ini penyusunan *sustainability report* lebih banyak mengacu kepada GRI. GRI didirikan tahun 1997 yang didirikan oleh perusahaan yang tergabung dalam *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)*. *GRI guide lines* versi 3, 2000- 2006 perusahaan harus menjelaskan dampak operasi perusahaan secara sosial dibagi lagi ke dalam empat aspek yang berbeda, yaitu *labor practices* dan *decent work, human rights, society* dan *product responsibility*.

Perkembangan selanjutnya adalah ISO 26000 yang mengatur standar CSR. ISO 26000 akan dipublikasikan november 2009. *Social responsibility* adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak dari berbagai keputusan dan aktivitas mereka terhadap masyarakat dan lingkungan yang terbuka dan etis.

Pelaksanaan CSR di Indonesia

Di Indonesia, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi suatu kewajiban diatur dalam UU No. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam pasal 74 UUPT tersebut secara jelas dipaparkan keharusan membuat laporan tahunan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bagi perusahaan terbuka

atau *go public*, laporan tanggung jawab sosial perusahaan harus dipublikasikan kepada masyarakat luas. Adapun perusahaan yang belum *go public*, laporan tanggung jawab sosial tetap harus dilaporkan walau hanya terbatas pada pihak-pihak terkait seperti regulator dan para pemegang saham.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan CSR secara *Mandatory* (diwajibkan UU oleh perusahaan besar)

Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan regulasi pelaksanaan CSR dengan mencantumkan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam dan berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana dicantumkan pada Pasal 74 ayat 1-4

Pelaksanaan CSR secara sukarela oleh perusahaan besar

Aktivitas CSR sebagai *discretionary business practice* di Indonesia masih dapat dibagi kedalam dua kategori. Pertama, pelaksanaan CSR sebagai *discretionary business practice* oleh perusahaan multinasional

Kedua, pelaksanaan CSR oleh perusahaan- perusahaan domestik harus mengalami proses belajar lebih panjang dalam merancang dan melaksanakan aktivitas CSR, karena perusahaan- perusahaan ini pada umumnya belum memiliki pengalaman yang banyak didalam mengelola aktivitas CSR.

b. Pelaksanaan CSR oleh Perusahaan Multinasional di Indonesia

Sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis di berbagai negara, perusahaan multinasional sangat membutuhkan legitimasi dari masyarakat/ warga negara

dimana perusahaan multinasional berada. Hal ini sesuai dengan dasar pemikiran *corporate citizenship*.

Menurut Wibisono (2007) dalam Andini (2011), ada 3 alasan mengapa perusahaan mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan operasi usahanya

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat.
2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat *simbiosis mutualisme*.
3. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial.

Penilaian Terhadap CSR

Penilaian terhadap CSR bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, peluang, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan aktifitas CSR secara berkesinambungan, tidak bersifat parsial. Penilaian CSR juga membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan dan peluang yang ada, sehingga mampu memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Penilaian yang tepat harus memberikan pemahaman mengenai hal- hal berikut :

1. Nilai- nilai dan etika perusahaan
2. Dorongan eksternal dan internal yang memotivasi perusahaan untuk menjalankan aktifitas CSR
3. Isu- isu penting seputar CSR yang dapat memberikan dampak bagi perusahaan
4. *Stakeholder- stakeholder* kunci

5. Struktur pengambilan keputusan yang berlaku dalam perusahaan saat ini, kekuatan dan kelemahannya dalam mengimplementasikan program- program CSR yang terintegrasi
6. Implikasi terhadap sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki
7. Aktifitas- aktifitas berkaitan dengan CSR yang sedang berjalan

Berdasarkan perkembangan konsep definisi oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk menerapkan cara bisnis yang etis dan tidak lepas dari harapan agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dengan mempedulikan lingkungan sosial serta semua pihak yang berkepentingan lainnya.

GRI adalah lembaga independen yang bergabung dengan persatuan program lingkungan. Item- item indeks GRI pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Indeks Pengungkapan CSR
Indeks Pengungkapan

INDIKATOR KINERJA EKONOMI
<p>Aspek Kinerja Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah 2. Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktifitas organisasi 3. Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti

4. Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah

Aspek kehadiran pasar

5. Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan
6. Kebijakan, praktek dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan
7. Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan

Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung

8. Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura atau probono
9. Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya

INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN

Aspek Material

10. Penggunaan bahan, diperinci berdasarkan berat atau volume
11. Persentase penggunaan bahan daur ulang

Aspek Energi

12. Penggunaan energi langsung dari sumber daya energi primer
13. Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber primer
14. Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi
15. Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut
16. Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai

Aspek Air

17. Total pengambilan air per sumber
18. Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air
19. Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang

Aspek Biodiversitas (keanekaragaman hayati)

20. Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelopor yang berlokasi didalam atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah- daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar daerah yang diproteksi
21. Uraian atas berbagai dampak yang signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati didaerah yang diproteksi (dilindungi) dan didaerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)
22. Perlindungan dan pemulihan habitat
23. Strategi, tindakan dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati
24. Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam daftar merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah- daerah yang terkena dampak operasi

Aspek Emisi, Efluen dan Limbah

25. Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat
26. Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya dirinci berdasarkan berat
27. Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya
28. Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon dirinci berdasarkan berat
29. Nox, Sox dan emisi udara signifikan lainnya yang dirinci berdasarkan jenis dan berat
30. Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan
31. Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan
32. Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan
33. Berat limbah yang diangkut, diimpor diekspor atau diolah yang dianggap berbahaya
34. Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor

Aspek Produk dan Jasa

- 35. Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut
- 36. Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori

Aspek kepatuhan

- 37. Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi non moneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan

Aspek Pengangkutan/ Transportasi

- 38. Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan

Aspek Menyeluruh

- 39. Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis

INDIKATOR KINERJA SOSIAL

Praktek Tenaga Kerja dan pekerjaan Layak

- 40. Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah
- 41. Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah
- 42. Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya

Aspek Tenaga Kerja / Hubungan Manajemen

- 43. Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar menawar kolektif tersebut
- 44. Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Jabatan

- 45. Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia kesehatan dan keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan

jabatan

46. Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari- hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah
47. Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/ bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat mengenai penyakit berat/ berbahaya
48. Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan

Aspek Pelatihan dan Pendidikan

49. Rata- rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/ kelompok karyawan
50. Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier
51. Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pembangunan karier secara teratur

Aspek Keberagaman dan Kesempatan Setara

52. Komposisi badan pengelola/ penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/ kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.
53. Perbandingan/ rasio gaji dasarpria terhadap wanita menurut kelompok/ kategori karyawan

Hak Asasi Manusia

Aspek Prakten Investasi dan Pengadaan

54. Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia
55. Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM
56. Jumlah Waktu Pelatihan Bagi Karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta porsedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani

pelatihan

Aspek Nondiskriminasi

57. Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/ dilakukan

Aspek Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul

58. Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak- hak tersebut

Aspek pekerja anak

59. Kegiatan yang diidentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah- langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak

Aspek kerja paksa dan wajib

60. Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah- langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib

Aspek praktek/ tindakan pengamanan

61. Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi

Aspek Hak Penduduk Asli

62. Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah- langkah yang diambil

Masyarakat

Aspek komunitas

63. Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri

Aspek korupsi

- 64. Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi
- 65. Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur anti korupsi
- 66. Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi

Aspek Kebijakan Publik

- 67. Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik
- 68. Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara diman perusahaan beroperasi

Aspek Kelakuan Tidan Bersaing

- 69. Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersainagn, anti trust, dan praktek monopoli serta sanksinya

Aspek kepatuhan

- 70. Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukun dan peraturan yang dilakukan

Tanggung Jawab Produk

Aspek Kesehatan dan Keamana Pelanggan

- 71. Tahapan daur hidup dimana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut
- 72. Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup per produk

Aspek pemasangan label bagi produk dan jasa

- 73. Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut
- 74. Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label per produk
- 75. Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan

Aspek Komunikasi Pasar

76. Program- program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi dan sponsorship menurut produknya

77. Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship menurut produknya

Aspek keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan

78. Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan (privacy) pelanggan dan hilangnya data

Sumber: www.globalreporting.org

2. Kinerja Lingkungan

Menurut Suratno dkk (2006), kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek- aspek lingkungannya. Kinerja lingkungan yang dilakukan pada saat ini masih atas desakan masyarakat. Menurut Imas (2008), adanya kesadaran perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial membuat para investor menaruh perhatian terhadap isu lingkungan ini, terutama kaitannya dengan pemilihan investasi. Para investor tidak akan memilih investasi yang banyak mengandung risiko, yang disebabkan oleh kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengembangkan usaha perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik. Artinya, perusahaan menciptakan hubungan yang baik dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kerjanya. Perusahaan juga harus menjaga dampak kegiatan operasinya terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan dan lingkungan hidup.

Menurut Preston (1981) dalam Lindrianasari (2007:4), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik dan melakukan pengungkapan yang tinggi memosisikan mereka sebagai perusahaan yang memiliki aktifitas yang berguna dan kualitas pengungkapan ini juga didorong legitimasi terhadap masyarakat. Selanjutnya Pava dan Krauz (1996) dalam Lindriana (2007:4), menjelaskan hal yang serupa bahwa sesungguhnya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan tidak akan membuat perusahaan kehilangan *stakeholdersnya*. Perusahaan yang memperlihatkan tanggung jawab sosialnya, terbukti memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memperlihatkan tanggung jawab sosial.

Menurut Guthrie dan Parker dalam Novita (2009:1), pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis. Perusahaan yang memiliki *enviromental performance* yang baik dari mengurangi pengungkapan biaya- biaya lingkungan masa depan perusahaan. Pengungkapan informasi biaya- biaya lingkungan ini harus dirasakan sebagai berita gembira (*good news*) bagi investor dan calon investor tersebut. Perusahaan yang memiliki *good news* akan lebih cenderung meningkatkan

pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya. Oleh karena perusahaan dengan *enviromental performance* yang baik perlu mengungkapkan informasi kualitas dan mutu lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan *enviromental* yang buruk.

Kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). PROPER merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan disinsentif kepada penanggung jawab usaha oleh Kementerian Lingkungan Hidup . Pemberian insentif berupa penghargaan PROPER. Pemberian penghargaan PROPER berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dalam pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran lingkungan hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi lima warna yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam.

Penilaian PROPER adalah sebagai berikut:

1. Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan bertanggung jawab terhadap masyarakat
2. Hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan
3. Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan
4. Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang telah melakukan pengelolaan lingkungan tidak sesuai dengan peraturan

5. Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang sengaja melakukan kelalaian menyebabkan kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Menurut Lindrianasari (2007), ada empat pengukuran kinerja lingkungan yang bisa digunakan, antara lain: AMDAL (uji BOD dan COD air limbah), PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang dikeluarkan oleh KLH (Kementerian Lingkungan Hidup), ISO yakni ISO 14001 untuk Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 17025 untuk Sertifikasi Uji Lingkungan dari lembaga independen dan GRI (*Global Reporting Initiative*). Peneliti tidak menggunakan AMDAL karena keberhasilan AMDAL tidak terlihat jelas dalam laporan tahunan. Peneliti tidak menggunakan ISO 14001 dan ISO 17025 karena masih sedikit perusahaan yang melakukan sertifikasi ISO 14001 dan ISO 17025. Peneliti tidak menggunakan indeks GRI karena indeks GRI sudah dipakai peneliti untuk mengukur tingkat kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Jadi, peneliti menggunakan Hasil PROPER untuk mengukur kinerja lingkungan. Pengukuran dilakukan dengan memberikan skor berdasarkan tingkat warna yaitu:

Emas	: skor 5
Hijau	: skor 4
Biru	: skor 3
Merah	: skor 2
Hitam	: skor 1

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial menurut Rathiesen dalam Rawi (2008:9), kepemilikan manajemen terhadap perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *insider ownership* ini didefinisikan sebagai persentase suara yang berkaitan dengan saham dan *option* yang dimiliki manajer dan direksi suatu perusahaan. Menurut Gideon (2005), mengatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari jumlah saham yang dikelola oleh perusahaan. Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan membuat manajer ikut merasakan manfaat dan rugi dari pengambilan keputusan yang salah. Hal tersebut mengindikasikan mengenai pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajer. Kepemilikan manajerial diharapkan manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan dapat mengambil keputusan yang tepat karena manajer ikut berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Kerugian dan keuntungan perusahaan juga akan sangat dirasakan oleh manajer karena saham yang dimilikinya itu sehingga, dengan kepemilikan manajerial dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Ibrahim dalam Eliza (2010), menyatakan ada lima tipe kepemilikan saham yaitu :

1. Kepemilikan *private*, keadaan dimana 80%, atau lebih saham dalam perusahaan dimiliki oleh individu atau kelompok bisnis yang berkepentingan terhadap perusahaan

2. Kepemilikan mayoritas, keadaan dimana 50 -80% jumlah saham dimiliki oleh individu tertentu.
3. Kepemilikan minoritas, keadaan dimana 20- 50 % jumlah saham dimiliki oleh individu yang berkepentingan terhadap perusahaan
4. Kepemilikan manajemen, keadaan dimana < 20% saham dimiliki oleh kelompok individu atau kelompok bisnis yang berkepentingan dengan perusahaan
5. Kepemilikan *pyramid*, keadaan dimana mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh perusahaan besar yang cenderung juga saham di perusahaan lain.

Menurut Frestawati (2007:22) kepemilikan saham akan berdampak pada kebijaksanaan yang diambil oleh pemiik saham diataranya adalah

- a. Perusahaan yang dikontrol oleh keluarga, individu-individu atau sebuah kelompok elit yang berasal dari dalam perusahaan menjadikan perusahaan mempunyai tingkat kebijaksanaan yang luas (kepemilikan ini disebut kepemilikan manajerial)
- b. Perusahaan yang dikontrol oleh pemegang saham dari luar lingkungan perusahaan seperti perusahaan lain, institusi keuangan mempunyai kebijakan yang ketat dan terbatas (kepemilikan institusional)
- c. Perusahaan yang tidak mempunyai sentral pengendalian dimana manajemen memiliki kebijakan yang tidak terbatas dalam penentuan produk dan aliran ke pasar modal.

Menurut Handoko (2000), secara ringkas dapat dikatakan bahwa dalam dekade sekarang ini, para manajer semakin dituntut untuk mengikuti dan mentaati hukum

dan standar- standar etika masyarakat. Pada waktu yang sama, perhatian manajer harus dipusatkan pada pemberian tanggapan- tanggapan organisasi terhadap masalah- masalah sosial. Hal ini mempunyai dua konsekuensi utama. Pertama, banyak organisasi sekarang mengesampingkan tujuan utamanya memaksimalkan keuntungan, dan mengalihkan ke pemenuhan kebutuhan- kebutuhan masyarakat dengan perolehan keuntungan yang secukupnya. Kedua, pencapaian hasil- hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan fungsi tanggung jawab sosial perusahaan sekarang menjadi semacam peralatan untuk membantu suksesnya organisasi. Bagaimana para manajer memelihara penanganan masalah-masalah sosial akan mencerminkan etika pribadinya, kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi, dan nilai-nilai sosial perusahaan pada periode waktu tertentu

Menurut Anggraini dalam Rawi (2008), konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil, dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktifitas tersebut.

Menurut Reni dalam Prima (2009:5), hal ini mendukung teori keagenan bahwa semakin banyak kepemilikan manajemen akan semakin banyak melakukan kegiatan produktif yang dapat meningkatkan *image* perusahaan. menyatakan bahwa manajer memiliki kontrol utama atas integritas sistem akuntansi dan catatan

keuangan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan, menurut Wild (2005:90). Menurut Ihlashul (2011), mengemukakan bahwa seiring dengan adanya kemungkinan terjadinya manajemen laba maka dimungkinkan adanya kepemilikan manajemen dapat mempengaruhi luas pengungkapan perusahaan. Hal ini terkait dengan pemilik perusahaan yang sekaligus menjadi manajemen perusahaan. Menurut Keraf (1998:121) dalam Dina (2010), menyatakan pada tingkat operasional, tanggung jawab sosial dan moral perusahaan diwakili secara formal oleh pihak manajemen.

Pihak manajemen telah menerima kepercayaan untuk menjalankan perusahaan, oleh karena seluruh keputusan dan kegiatan bisnis perusahaan ada di tangan manajer maka pada tempatnya tanggung jawab sosial dan moral juga dipikul oleh mereka. Menurut Itturiaga dan Sanz (1998) dalam Dina (2010:31), kepemilikan manajerial diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial. Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam mengambil keputusan (direktur dan komisaris). Variabel ini diukur dengan rumus :

$$KM = \left(\frac{\text{jumlah saham yang dimiliki manajer, dewan direksi dan dewan komisaris}}{\text{total jumlah saham yang beredar}} \right) \times 100\%$$

4. Kepemilikan Institusional

Menurut Griffin (2006:115), investor institusional adalah investor besar seperti usaha dana yayasan dan dana pensiun yang membeli saham perusahaan dalam jumlah yang besar karena mengontrol berbagai sumber daya. Menurut Vira (2010:21), investor institusional adalah saham dalam suatu perusahaan publik yang

dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar lainnya, bank, institusi- institusi tertentu yang dapat mengontrol operasi atau kebijakan perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak luar dalam bentuk institusi, menurut Fakhrial (2007) dalam Eliza (2010). Aktivitas *monitoring* mampu mengubah struktur pengolahan perusahaan dan mampu mensubstitusi biaya keagenan lain (utang, dividen dan kepemilikan manajerial) sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat.

Menurut Barnae dalam Yulia (2011), Institusional *shareholders* dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic manager*. Hal ini karena perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan oleh institusi atau suatu lembaga yang memiliki kepemilikan saham yang besar dalam perusahaan. Sehingga institusi tersebut memiliki kekuasaan untuk memonitor kinerja manajemen perusahaan. Kegiatan memonitor manajemen perusahaan dapat meningkatkan kinerja manajemen dan menghilangkan kecurangan yang dilakukan manajemen yang dapat merugikan perusahaan dan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Kelebihan investor institusional dibanding investor individual

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih dari pada investor individual untuk mendapatkan informasi
2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi
3. Investor institusional, secara umum memiliki realisasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen
4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan
5. Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara tepat yang tercermin di tingkat harga.

Persentase jumlah saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon, 2005). Cornet et al dalam Yulia (2011), menyatakan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer sehingga ia lebih fokus pada kinerja perusahaan dan akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Ukuran yang digunakan dalam menghitung kepemilikan institusional dikemukakan oleh itturiaaga dan sanz dalam fakhrial (2007).

$KI = (\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga} : \text{total jumlah saham yang beredar}) \times 100\%$

5. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, menurut (Belkaoui, 2007:201). Menurut Merchant dan Rockness (1994) dalam Danang (2011), mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu tindakan manajemen perusahaan merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan agar terbentuk informasi mengenai keuntungan ekonomis yang sebenarnya tidak dialami oleh perusahaan. Menurut (Sri, 2008:51) dalam Adriyani (2011), manajemen laba didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi

. Tujuan manajemen laba untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat berupa bonus yang diinginkan oleh manajer untuk pribadinya. Bonus yang didapatkan oleh manajer tentunya dengan cara menaikkan laba, agar perusahaan membagikan bagian laba tersebut sebagai penghargaan atas apa yang telah diusahakan oleh manajer untuk menaikkan laba perusahaan. Menurut Scott (2008:351), manajer dapat memilih kebijakan akuntansi dari seperangkat atas suatu kebijakan GAAP untuk mengharapkan bahwa dengan memilih kebijakan tersebut manajer dapat memaksimalkan nilai atau harga pasar dari perusahaan. Seringkali manajemen laba ini mencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah yaitu laba.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah aktifitas intervensi dari manajer dengan menggunakan manajemen akrual untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang sebenarnya tidak dialami

perusahaan. Manajemen laba juga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Meningkatnya laba membuat manajer mendapatkan bonus dari pihak perusahaan.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Marditiana (2012), faktor yang memotivasi terjadinya manajemen laba adalah:

1) *Bonus plan hypothesis*

Bahwa pada perusahaan dengan *bonus plan* cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan *income* saat ini.

2) *Debt (equity) hypothesis*

Bahwa pada perusahaan yang mempunyai *rasio debt to equity* besar maka manajer perusahaan tersebut cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan pendapatan atau laba.

3) *Political cost hypothesis*

Bahwa pada perusahaan yang besar, yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian besar masyarakat akan cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan.

Scott (2008:352), membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua yaitu:

1. Sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan biaya politik
2. Memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (efficient earnings management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam

mengantisipasi kejadian- kejadian yang tidak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Teknik manajemen laba menurut Rahmawati dkk (2006) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain- lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode angka tahun ke metode depresiasi garis lurus

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain:

Mempercepat/ menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/ menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

Menurut Mc Williams et al dalam Danang (2012), usaha yang memungkinkan dilakukan oleh manajer untuk mengamankan posisi mereka atas tindakan manajemen laba yang dilakukan adalah dengan membuat dan melibatkan diri dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan

stakeholder dan lingkungan sosial masyarakat, dalam hal ini *corporate social responsibility* (CSR). Untuk menarik dukungan dari kelompok tersebut, kegiatan CSR yang biasa dilakukan adalah : memasukkan aspek sosial ke dalam proses produksi, mengadopsi praktek pengembangan sumber daya manusia secara progresif, meningkatkan kegiatan yang ramah lingkungan melalui kegiatan daur ulang dan pengurangan polusi dan limbah atau dengan mempercepat tujuan dari organisasi masyarakat.

Manajemen laba dapat diukur melalui *discretionary accrual* (DA) sebagai proksi manajemen laba yang dihitung dengan menggunakan *modified jones model* (dechow et al, 1995) dalam Adriyani (2011: 24). Langkah pertama dalam mengukur DA adalah menghitung nilai total akrual yang bertujuan untuk mendapatkan parameter untuk menghitung nilai *nondiscretionary accrual* (NDA). Total akrual menggunakan persamaan

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 (1/ A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it}/ A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/ A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

Regresi dilakukan untuk mendapatkan parameter masing- masing perusahaan sampel kemudian digunakan untuk menemukan NDA dengan menggunakan persamaan:

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/ A_{it-1}) - \alpha_2 (\Delta Sales_{it} - \Delta Rec_{it}/ A_{it}) + \alpha_3 (PPE_{it}/ A_{it-1})$$

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it} - NDA_{it}$$

Keterangan :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

DA_{it} = *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} = *Non discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

NI_{it} = Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = Kas dari operasi (*cash flow from operation*) perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun $t-1$

$\Delta Sales_{it}$ = selisih *sales* perusahaan i pada periode t

ΔRec_{it} = selisih *receivable* perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun $t-1$

PPE_{it} = Nilai aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

ϵ_{it} = *Error term* perusahaan i pada tahun t

Jika nilai *discretionary accrual* perusahaan negatif berarti manajemen laba yang dilakukan perusahaan yaitu dengan cara menurunkan laba, sebaliknya jika nilai *discretionary accrual* perusahaan positif berarti manajemen laba yang dilakukan perusahaan yaitu dengan menaikkan laba perusahaan, dan jika bernilai nol berarti manajemen laba dilakukan dengan perataan laba.

4. Solvabilitas

Menurut Subramanyam (2005:185), solvabilitas/ solvensi mengacu pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dan kemampuannya memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Sedangkan menurut Muanawir (2002:32), solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Syofyan syafri harahap (2010), rasio solvabilitas adalah kemampuan

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban lainnya apabila perusahaan dilikuidasi.

Analisis solvabilitas perusahaan berbeda dengan analisis likuiditas. Pada analisis likuiditas, jangka waktu biasanya pendek untuk peramalan arus kas yang lebih akurat. Peramalan jangka panjang kurang dapat diandalkan sehingga analisis solvabilitas menggunakan ukuran analitis yang kurang akurat, tetapi lebih menyeluruh. Analisis solvabilitas melibatkan beberapa elemen kunci. Analisis struktur modal adalah salah satunya.

Struktur modal mengacu pada sumber pendanaan perusahaan. Pendanaan dapat diperoleh dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pendanaan jangka pendek sementara yang lebih berisiko. Saat memperoleh pendanaan, perusahaan akan menginvestasikannya pada berbagai aset. Aset mencerminkan sumber keamanan sekunder bagi pemberi pinjaman dan diperoleh dari pinjaman yang dijamin oleh aset tertentu hingga aset yang tersedia sebagai pengaman umum bagi kreditor tanpa jaminan. Hal ini dan faktor lainnya menghasilkan perbedaan risiko yang terkait dengan berbagai aset dan sumber pendanaan.

Elemen kunci solvabilitas jangka panjang lainnya adalah laba (*earnings*) atau kemampuan menghasilkan laba (*earning power*) yang menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi. Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai sumber pendanaan. Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko gagal melunasi utang bergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai aset yang dimiliki perusahaan.

Rasio struktur modal merupakan alat analisis solvabilitas lainnya. Ukuran rasio struktur modal mengaitkan komponen struktur modal satu sama lain dengan totalnya. Tingkat solvabilitas merupakan tingkat resiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva. Tingginya rasio ini berkemungkinan adanya gagal bayar oleh perusahaan dalam membayar utang-utangnya. Menurut Subramanyam (2005:212), bagi investor saham biasa, utang mencerminkan resiko kerugian investasi, namun dimbangi dengan potensi keuntungan dan leverage keuangan.

Menurut Trisiwi (2009:12), perusahaan yang mempunyai proporsi utang lebih banyak dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang besar. Oleh karena itu perusahaan mempunyai komposisi utang yang tinggi wajib memenuhi kebutuhan informasi yang cukup memadai bagi kreditur. Menurut Gunawan (2000) dalam Ahmad (2012), solvabilitas dan ukuran perusahaan berhubungan positif dengan luas pengungkapan. Menurut Wallace et al (2005) dalam Tri Siwi (2009), suatu perusahaan dengan utang yang besar cenderung untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada krediturnya.

Menurut Rahajeng (2010), untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur, maka diperlukan tambahan informasi, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang menunjukkan bahwa entitas memiliki peluang untuk tetap bertahan atau *going concern*. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya berdampak pada besarnya pengeluaran untuk partisipasinya dalam melaksanakan CSR. Menurut Lekok dan Johan (2006) dalam Ahmad (2012), entitas dikatakan *solvabel* apabila

memiliki aset dan kekayaan yang cukup untuk menutup liabilitasnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi.

Tingkat solvabilitas entitas dapat dijadikan indikator untuk mengukur kemampuan entitas dalam memenuhi liabilitas jangka pendek. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang, dengan cara menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya pada saat perusahaan dilikuidasi. Untuk meyakinkan kreditur bahwa perusahaan solvabel, maka perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap terutama tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utang jangka panjang dan memiliki nilai jangka panjang untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Beberapa rasio untuk mengukur solvabilitas yaitu :

1. *Debt to equity ratio*

Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Formulasi dari *debt to equity ratio* adalah

$$\text{DER} = (\text{Total utang} : \text{modal sendiri}) \times 100\%$$

2. *Debt to total assets*

Menunjukkan beberapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan utang atau beberapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Kreditur lebih menyukai rasio utang yang rendah karena semakin rendah rasio ini, maka semakin besar perlindungan terhadap kerugian kreditur dalam peristiwa likuidasi. Disisi lain, pemegang saham akan menginginkan *leverage* yang lebih besar karena akan dapat meningkatkan laba yang diharapkan.

$$\text{Debt to total assets} = (\text{Total utang} : \text{total aktiva}) \times 100\%$$

3. *long term debt to total asset*

Rasio total utang jangka panjang terhadap total aset

Total utang jangka panjang : aset

4. *Long term debt to equity capital ratio*

Rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Mengukur hubungan antara utang jangka panjang (biasanya disebut kewajiban tak lancar) terhadap modal ekuitas.

Rumusnya= Utang jangka panjang : ekuitas pemegang saham

5. *Time Interest Earned Ratio*

$$(\text{EBT} + \text{Interest Expense}) : \text{Interest Expense}$$

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti menggunakan rasio *debt to total assets* untuk menilai solvabilitas perusahaan karena peneliti ingin memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya saat perusahaan di likuidasi.

B. Evaluasi Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Evaluasi Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama pengarang	tahun	Hasil penelitian
1	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Umur Perusahaan Terhadap <i>CSR Disclosure</i>	Indah dewi utami dan rahmawati	2010	kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR
2	Faktor- faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan publik di Indonesia	Agatha aprinda kristi	2011	Kepemilikan saham institusi tidak berpengaruh sig positif terhadap pengungkapan csr
3	Pengaruh <i>Earning Management</i> dan Mekanisme CG terhadap Pengungkapan CSR perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Titan	2012	Manajemen laba, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh sig terhadap pengungkapan csr
4	Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan kegiatan csr	Ahmad kamil dan antonius	2012	Solvabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan csr
5	<i>Corporate Governance</i> Dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan	Ahmad nurkhin	2010	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh sig terhadap pengungkapan csr
6	Pengungkapan informasi sosial dan faktor- faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan	Fr. Reni retno anggraini	2006	Kepemilikan manajerial berpengaruh sig positif terhadap pengungkapan informasi sosial
7	<i>The effect of GCG toward disclosure of CSR in manufacturing yang terdaftar di BEI</i>	Kamaliah al- azhar, Arif Rahman	2010	Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

8	Hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi perusahaan di Indonesia	Lindriana sari	2007	Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan
9	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Maria wijaya	2012	Kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan csr
10	Pengaruh <i>enviromental performance</i> dan <i>political visibility</i> terhadap pengungkapan csr	Novita indrawati	2009	<i>Enviromental performance</i> berpengaruh sig positif terhadap pengungkapan csr
11	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan csr pada laporan tahunan perusahaan untuk industri manufaktur	Prima apriweni	2009	Kepemilikan manajemen tidak berpengaruh Signifikan terhadap pengungkapan csr
12	Pengaruh mekanisme GCG terhadap CSR	Yulia dan Melvie	2011	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh sig positif terhadap pengungkapan csr
13	Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Muhammad Ihlashul Amal	2011	Manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan
14	Pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas dan solvabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.	Khoyum	2012	Solvabilitas berpengaruh sig positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan yang baik mengurangi pengungkapan biaya biaya lingkungan masa depan perusahaan. Pengungkapan informasi biaya-

biaya lingkungan ini harus dirasakan sebagai berita gembira (*good news*) bagi calon investor tersebut. Menurut Preston (1981) dalam Lindriana (2007:4), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik dan melakukan pengungkapan yang tinggi, memposisikan mereka sebagai perusahaan yang memiliki aktifitas yang berguna dan kualitas pengungkapan ini juga didorong legitimasi terhadap masyarakat. Menurut Novita (2009), perusahaan yang memiliki *good news* akan lebih cenderung meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya. Oleh karena itu, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang buruk. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya adalah

H1 : Terdapat hubungan yang positif signifikan antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2. Hubungan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajer (agen). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Reni (2006), mengatakan bahwa permasalahan keagenan muncul karena agen bertindak sebagai pemilik sehingga cenderung untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. biaya yang timbul akibat permasalahan ini disebut biaya agensi. Kepemilikan saham oleh agen, membuat agen merasa turut menjadi bagian dari pemilik perusahaan sehingga, dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Gray et al (1989) dalam Kamaliah (2010), manajer perusahaan berusaha untuk

mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktifitasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya adalah

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

3. Hubungan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Kepemilikan institusional dapat dijadikan upaya mengurangi masalah agensi melalui proses monitoring. Pemegang saham institusional memiliki *opportunity*, *resource* dan *expertise* menganalisis kinerja dan tindakan manajemen. Menurut Kamaliah (2010), investor institusional memiliki kekuatan untuk bertanggung jawab dalam menerapkan *Good Corporate Governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Menurut Arif dalam Indah (2010), semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen sehingga, kepemilikan institusi dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Jadi, kepemilikan institusional membuat perusahaan menjadi lebih transparan atas informasi yang dimilikinya, termasuk informasi mengenai kegiatan sosial perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya adalah

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

4. Hubungan manajemen laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Manajemen memberikan informasi yang berlebih dalam laporan tahunan untuk mengalihkan perhatian para pengguna laporan keuangan pada manajemen laba yang mereka lakukan. Pengungkapan tanggung jawab sosial digunakan sebagai alat oleh manajer untuk mengamankan posisi mereka yang telah melakukan manajemen laba. Menurut Prior et al (2008) dalam Ihlashul (2011), pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan ini digunakan oleh manajer sebagai alat untuk mengamankan kedudukannya dan digunakan untuk mengalihkan perhatian *stakeholder* dari monitoring aktifitas manajemen laba. Menurut Mc Williams et al dalam Danang (2012), kegiatan CSR yang biasa dilakukan untuk menarik dukungan dari kelompok tersebut adalah : memasukkan aspek sosial ke dalam proses produksi, mengadopsi praktek pengembangan sumber daya manusia secara progresif, meningkatkan kegiatan yang ramah lingkungan melalui kegiatan daur ulang dan pengurangan polusi dan limbah atau dengan mempercepat tujuan dari organisasi masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya adalah

H4 : Manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

5. Hubungan Solvabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Menurut Subramanyam (2005:185), solvabilitas/ solvensi mengacu pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dan kemampuannya memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu membayar kewajiban jangka panjang. Menurut Wallace et al dalam Trisiwi (2009), perusahaan yang memiliki utang besar cenderung untuk

memenuhi kebutuhan informasi kepada krediturnya karena tingginya rasio solvabilitas berkemungkinan adanya gagal bayar oleh perusahaan dalam membayar utang- utangnya. Menurut Rahajeng (2010), untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur, maka diperlukan tambahan informasi, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang menunjukkan bahwa entitas memiliki peluang untuk tetap bertahan atau *going concern*. Jadi, perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang dengan cara menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya adalah

H5 : Solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

D. Kerangka Konseptual

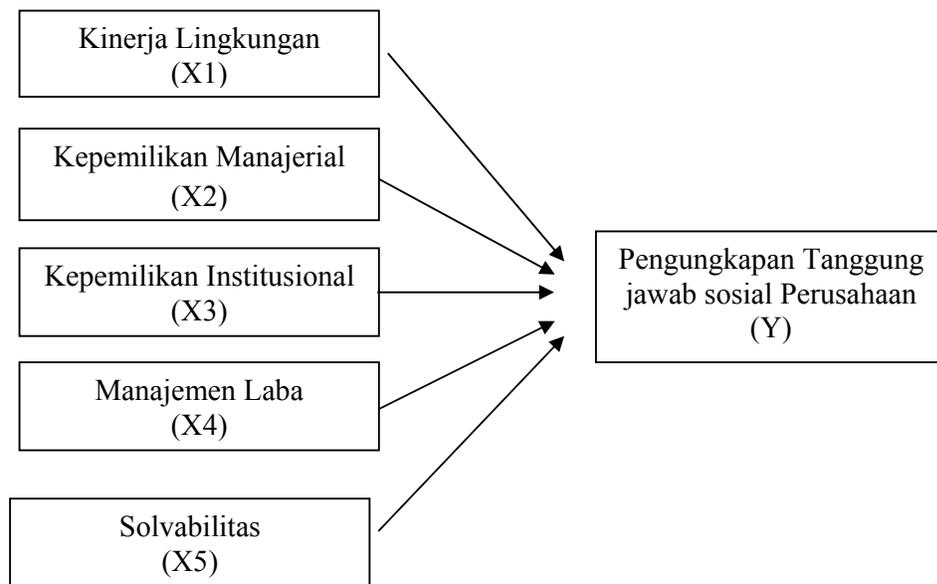
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan penyampaian informasi atas kontribusi perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Perusahaan adalah organisasi yang berdiri di tengah- tengah masyarakat. Kegiatan yang dilakukan perusahaan juga akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Banyak perusahaan saat ini yang berdiri secara besar- besaran tanpa memperhatikan dampak lingkungan sehingga masyarakat menuntut perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosialnya. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial juga dimotivasi oleh keinginan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dan juga karena adanya peraturan baru dari pemerintah Undang- Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan *go public* untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial dan melaporkan pertanggungjawabannya dalam laporan tahunan. Namun beberapa perusahaan sudah menerbitkan laporan berkelanjutan yang tersedia khusus untuk pengungkapan kegiatan *Coorporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan tersebut. Pengungkapan yang dilakukan tidak semuanya, bagaimanapun juga porsi pengungkapan tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh banyak faktor.

Perusahaan menjalankan operasinya perusahaan didanai oleh salah satunya adalah utang. Kreditur memberikan utang kepada perusahaan apabila perusahaan tersebut mampu melunasi utangnya dan solvabel. Perusahaan berusaha untuk meyakinkan kreditur bahwa perusahaan memiliki pengelolaan perusahaan yang baik. Investor menggunakan informasi solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitasnya. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang dengan menyediakan informasi lebih komprehensif karena tingginya rasio solvabilitas berkemungkinan adanya gagal bayar oleh perusahaan dalam membayar utang- utangnya sehingga perusahaan menggunakan informasi tanggung jawab sosial. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan, menyebabkan kemungkinan manajer untuk melakukan manajemen laba. Manajer memanipulasi laba untuk memperkaya dirinya. Kepemilikan saham oleh manajer merupakan salah satu cara untuk menghindari manajemen laba. Agar perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan, dibutuhkan pengawasan dari kepemilikan institusional. Sehingga, kinerja perusahaan bagus dan perusahaan juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat tempat beroperasi

Kinerja lingkungan yang baik merupakan berita yang bagus bagi perusahaan. Tujuan dari kegiatan tersebut dapat dicapai. Sehingga, perusahaan termotivasi melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Dari uraian kerangka konseptual, untuk menggambarkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dikemukakan suatu kerangka konseptual yaitu mengenai pengaruh kinerja lingkungan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, manajemen laba dan solvabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1
Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba dan

Solvabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H4 : Manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H5: Solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengujian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial artinya hipotesis pertama ditolak
2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial artinya hipotesis kedua ditolak
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial artinya hipotesis ketiga ditolak
4. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial artinya hipotesis keempat ditolak
5. Solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial artinya hipotesis kelima diterima

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Masih adanya beberapa variabel lain yang belum digunakan dan memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial
2. Tahun pengamatan penelitian masih terlalu singkat yaitu dari tahun 2009- 2011

C. Saran

Saran peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah hendaknya menetapkan regulasi yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai praktik dan pengungkapan, serta pengawasan CSR pada perusahaan di Indonesia sehingga praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia semakin meningkat
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas periode pengamatan agar dapat lebih menggambarkan kondisi pengungkapan CSR di Indonesia.
3. Peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel independen lain yang sesuai dan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha Aprinda Kristi. 2011. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Coorporate Social Responsibility pada Perusahaan Publik di Indonesia*. Skripsi. Universitas Brawijaya
- Ahmad Kamil dan Antonius Hersetya. 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan Coorporate Social Responsibility*. Media Riset Akuntansi (Vol.2 No.1 Februari). Hlm. 1-17
- Ahmad Nurkhin. 2010. *Coorporate Governance Dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan*. Jurnal Dinamika Akuntansi (Vol.2 No.1 Maret)
- Ahmed Riahi & Belkoui. *Teori Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Alifa Ruthinaya. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Luas Pengungkapan Coorporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan yang Teraftar di Indeks LQ45 Periode 2007-2011*. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya
- Andini Putri Sylvia. 2011. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, dan Umur Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Perusahaan yang Teraftar di BEI)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang
- Anna Marina. *Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dalam praktek Di Perusahaan Go Public di Indonesia*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Surabaya
- Arum Setyo M. 2012. *Analisis Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tanggung Jawab Soial dan Lingkungan dengan Coorporate Governance sebagai Variabel Moderating*. Skripsi . Universitas Diponegoro
- Danang Haryudanto. 2011. *Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tingkat Coorporate Social Responsibility dan nilai perusahaan*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Dina Amalia. 2010. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Status Perusahaan dan Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap Luas Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Keuangan Perusahaan*. Skripsi. Universitas Negeri Padang
- Eliza. 2010. *Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba*. Skripsi. Universitas Negeri Padang
- Fakhrial. 2007. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial dan Free Cash Flow terhadap utang*. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta